



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DUDUNG DAENURI**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **168257**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.342.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/37 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah Seluas 505 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 181.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/200 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 986.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 860 m2/110 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
5. Tanah Seluas 418 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 180.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 12.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 26.184.170**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	4.560.184.170
III. HUTANG	Rp.	1.843.850.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.716.334.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.